

LAPORAN
PERTEMUAN REGULER VIII
KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL
(KPDP-TCT) PROVINSI NTT
13 Desember 2018

Hari dan tanggal pertemuan : Kamis, 13 Desember 2018

Waktu Pertemuan (mulai dan akhir) : Mulai pukul 09:00, selesai pukul 17:00

Dibuka oleh : Ganef Wurgianto

Ditutup oleh : Yusni Kalelado

Lokasi Pertemuan : Ruang Pertemuan di Hotel Amaris, Kupang

Peserta (Nama/Institusi) :

1. Hary Christijanto – Dit PSDI, KKP
2. Ganef Wurgiyanto (DKP Provinsi NTT)
3. Ernes Hamel (DKP Provinsi NTT)
4. Yoyos Thelik (DKP Provinsi NTT)
5. Yusni Kalelado (DKP Provinsi NTT)
6. Siprianus Seru (DKP Provinsi NTT)
7. Anita Mozes (DKP Provinsi NTT)
8. Mania Ali Asang (DKP Provinsi NTT)
9. Yan Asraka (DKP Provinsi NTT)
10. Nikolaus Suban (DKP Provinsi NTT)
11. Mundus (DKP Provinsi NTT)
12. Dedy Duka (DKP Provinsi NTT)
13. Molandri Aditae (PPP Kupang)
14. Rita (Dinas Perikanan Kota Kupang)
15. Firminia Dae Bha (BAPPEDA NTT)
16. Imanuel J. Emola (UKAW)
17. Halim Naka (KSOP Kupang)
18. I Gede Arya S. (PSDKP Kupang)
19. Agustinus A. H. R (SUPM KUpang)
20. Andi Rahmat S.I.K (Dit Polairudda NTT)
21. Kinglif H. Kota (Dit Polairud NTT)
22. Jakariya (Lantamal)
23. Sriawan (UMK)
24. Susy Herwaty (UMK)
25. Yesaya Mau (Poltek KP Kupang)
26. Hilmar Dayton (PT. Primo Indo Ikan)
27. Thomas B. Penebang (CV. GIOVANNI)
28. Imanuh M. (CV. ASK)

29. Martin (UD. TH)
30. Erny (CV. CEP)
31. Beni Mune (UD. Bara)
32. Yunus (UD. BM)
33. Erdi Lazuardi (WWF lesser sunda)
34. Saut Tampubolon (MDPI)
35. Wildan (MDPI)
36. A. Riza Baroqi (MDPI)
37. Santri Dinalhusna (MDPI)
38. Amrollah (MDPI)
39. Alief Dharmawan (MDPI)
40. Agnes (MDPI)
41. Reitz (MDPI)

Pembukaan

a. Pengantar singkat kegiatan (Pak Saut) :

- MDPI LSM pertama yang membuat MoU dengan KKP, telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018
- Quota tuna Indonesia 5889 ton dan ingin diambil oleh negara lain
- Dari data tuna yang ditagging banyak tertangkap di perairan Indonesia
- Tuna dikelola secara internasional dalam RFMO
- Hewan ETP sangat berperan penting dalam ekosistem laut, sehingga perlu didata
- Indonesia butuh data agar bisa mengelola hasil perikanan
- Data yang minim, analisisnya tidak akan bagus. Data bagus, maka hasil analisisnya bagus sehingga kebijakan pengelolaan yang tepat dapat dilaksanakan
- Data merupakan milik nelayan dan supplier
- Data harus sesuai, mewakili, up to date dan relevan
- 3 misi menteri KP yaitu kedaulatan (TNI AL dan Polairud), keberlanjutan (Pemerintah) dan kesejahteraan (untuk rakyat).

b. Arahan dan Pembukaan kegiatan (Pak Ganef) :

- Data harus di evaluasi dan harus dibenahi
- Di Uni Eropa, mindset masyarakatnya memikirkan asal-usul bahan makanan yang mereka makan
- Menurut pak Ganef, ikan tidak masuk dalam ketahanan pangan namun masuk dalam bisnis karena ikan memiliki nilai ekonomis yang tinggi
- Pemerintah pusat memberikan izin purse sein pelagis besar memancing di perairan timor tanpa menggunakan rumpon namun pada kenyataannya mereka tetap menggunakan rumpon dan itu tidak mungkin jika mereka tidak menggunakan rumpon
- HNSI sudah membuat surat terbuka terkait pelarangan perizinan operasi untuk kapal pursein pelagis besar namun tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat

- Keberadaan semua kita disini tujuannya untuk kebaikan NTT atau perbaikan
- Diharapkan kepada semua stakeholder agar bisa kolaborasi dan memberikan data yang valid setiap 6 bulan.

-

Pencapaian aksi KPDP 6 bulan terakhir (Pak Ernes D. Hamel)

- Pengumpulan data hasil tangkapan sudah dilakukan
- FB KPDP masih dalam proses dan perlu penambahan anggota komite
- Telah dilakukan sosialisasi OSS dan penataan rumpon
- DKP Kab/Kota harus menyediakan data namun daerah tersebut tidak memiliki data
- Sosialisasi logbook dari syahbandar
- Telah dilakukan pendataan rumpon
- Dari Januari-November 2018, Data logbook PPI Oeba untuk TCT yaitu 3.804.300 ton, Pusdatin untuk TCT yaitu 30.579.520 ton dan data ifish januari-november 2018 yaitu 373.262 kg
- Telah dilaporkan 49 unit rumpon diteluk kupang by name by address
- Untuk surat peirizinan sudah dikeluarkan oleh DKP sekitar 300an terdiri dari SIUP, SIPI, dll.
- Pak Ernes berharap untuk kolaborasi dan kombinasi data agar kedepannya bisa menjadi 1 data
- Pemanfaatan pada tahun 2017 yaitu 138.368 ton (35,18%)

a. Diskusi

- Pak Gede : Untuk data PSDKP sampai Oktober yaitu 2,5 jtan untuk cakalang, 639rb ton tongkol, 1,7 jtan untuk tuna
- Wildan mengatakan bahwa data di ifish hanya sampling dan memperkaya jika di bandingkan dengan data logbook PPI Oeba lebih lengkap dibanding di ifish
- Pak Saut menyarankan bahwa semua data itu disandingkan dulu. Harapannya akan mengeluarkan 1 data dan sumbernya bisa dari logbook, ifish, dll.
- Pak Yesaya mendukung masukan pak Saut. Banyak ikan yang didaratkan tidak hanya di PPI Oeba dan PPP Tenau namun didaratkan juga pada Tablolong dan Oesapa karena pembeli lebih banyak di Oesapa dan Tablolong sehingga perlu dilakukan monitoring. Perlu adanya penyuluh agar data tidak bias (masukan).

Rekomendasi Harvest Strategy (Pak Hary) :

- Logbook saat ini belum semua melaporkan hasil produksi
- Masih banyak data yang tidak terlapor selain dari tuna dan cakalang
- Pada data logbook di oeba dimana cakalang 64%, albakor 18%, madidihang 23%
- Ada 13 rekomendasi dari HS yaitu sosialisasi HS (1), pengumpulan data (5), lembaga WPP dan alokasi SDI (2), langkah pengelolaan (2), pendaftaran kapal (1), perbaikan RPP TCT (1).
- Perlu dilakukan pengendalian rumpon, ada penutupan daerah penangkapan tertentu, pengendalian hari operasional penangkapan, pengendalian jumlah kapal dan pengendalian tingkat hasil penangkapan.

- Standarisasi data CPUE long line untuk Madidihang lebih baik untuk analisis indeks kelimpahan karena tidak berasosiasi dengan rumpon
 - Balai riset perikanan laut menggunakan system database form yang disebut E-BRPL
 - Rekomendasi dimana penghentian penambahan ijin baru untuk perikanan YFT dan SKJ untuk kapal > 30 GT
 - Pengaktifkan kembali R-Via untuk mengetahui jumlah kapal yang menangkap tuna
- a. Diskusi
- Pak Hilmar : Permasalahan logbook yaitu ketidaksiapan dari PSDKP yang mana belum mampu melayani nelayan terutama SLO. Hal ini diharapkan dicarikan solusi terbaik mengingat personil dari PSDKP hanya 4 orang saja. Bagaimana keberlanjutan R-Via dan bagaimana cara updatenya karena ini merupakan tuntutan pasar juga. Tanggapan Pak Hary : untuk R-Via bandwich terbatas, pengetahuan operator terbatas, operatornya juga terbatas. Kedepannya akan ditata kembali dan dihidupkan untuk system R-Via ini. Saat ini sedang pengembangan e-logbook yang akan menanggulangi petugas dilapangan sehingga kapten akan bisa langsung menginput data melalui aplikasi e-logbook.

Perizinan perikanan tangkap (Ibu Yusni)

- Jenis perijinan tangkap yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi ada SIUP,SIPI,SIKPI,BPKP dan TDKP
- Permohonan perizinan SIPI SIUP dan SIKPI ditujukan ke gubernur tembusan ke kepala DKP Provinsi NTT
- Untuk STKA, SIPI andon dan BPKP diterbitkan oleh DKP Provinsi NTT
- Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan
- Untuk SIPI dan SIKPI hanya satu 1 tahun sesuai perda

Pelayanan asuransi nelayan dan KUSUKA (Pak Sispri)

- Nelayan kecil yaitu nelayan yang melakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan tradisional yaitu nelayan yang melakukan penangkapan dilokasi tertentu secara turun temurun. Nelayan buruh yaitu nelayan yang menyediakan tenaga yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan. Nelayan pemilik yaitu nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
- Jumlah nelayan di NTT 2018 yaitu 62.583
- Kartu KUSUKA sudah terealisasi yaitu 5.966 nelayan (per 13 desember).
- Banyak yang mengatakan asuransi nelayan. Namun sebenarnya bantuan premi asuransi nelayan dan berlaku 1 tahun.
- Tahun 2016 target 29.000 nelayan realisasi BPAN = 2.812 nelayan, Tahun 2017 target 15.000 realisasi BPAN = 17.000 nelayan dan tahun 2018 target 2.827 nelayan
- Target pencapaian BPAN untuk NTT 19.000 nelayan
- Ketika sudah berjalan baik OSS dan ketika nelayan mengurus perizinan akan secara otomatis KUSUKA akan terdeteksi
- KUSUKA baru diterima nelayan dari Sumba Timur

a. Diskusi :

- **Pak Hilmar** : Apakah ada petugas lebih untuk cek fisik ke Flores Timur? Siapa pelenggara asuransi KUSUKA? Apakah nelayan yang lain bisa ikut secara mandiri dan mekanismenya seperti apa? Batasan untuk nelayan kecil seperti apa? Batasan KUSUKA yang berimbas pada perizinan sampai kapan? **Tanggapan ibu Yusni** : dokumennya mungkin perlu dikirim ke DKP provinsi dan baru dilakukan cek fisik. **Tanggapan pak Sipri** ; PT Jasindo merupakan penyelenggara premi nelayan. Jika nelayan mau melanjutkan lagi itu termasuk asuransi mandiri dan bisa langsung lewat asuransi Jasindo. KUSUKA tidak memiliki batasan atau seumur hidup kecuali UU sudah berubah baru menyesuaikan dengan dengan UU. KUSUKA terintegrasi dengan KTP elektrik namun banyak nelayan masih menggunakan KTP non E-KTP. Batasan nelayan kecil diukur dari ukuran kapal. Berlakunya KUSUKA tergantung dari NSPK dari KKP. Saat ini yang masih berlaku asuransi nelayan.
- **Pak Sriawan** ; dalam pengurusan perijinan menurut ibu mudah namun dalam pengurusan kapal mungkin itu sulit. Siapa yang punya hak dalam pengurusan perijinan, apakah pemilik kapal dan nelayan? Apakah untuk agen pelayaranizinkan atau bagaimana? **Tanggapan ibu Yusni** : untuk sekarang sudah tidak ada biaya-biaya yang lain dalam pengurusan perijinan. Jika bapak menggunakan pihak ketiga itu dari bapak dengan pihak ketiga. Namun untuk di provinsi hanya membayar cek fisik dimana 10-20 GT hanya membayar 150 rb. Yang melakukan cek fisik dari petugas di DKP provinsi NTT. Untuk BPKP sudah online namun yang lainnya masih manual.
- **Dosen UNKAW (Pak Adi)** : Seandainya kartu itu terealisasi dinas harus memiliki data yang valid. Harapannya pemerintah provinsi memiliki peranan dalam hal tersebut dan perlu di validasi agar yang menerima KUSUKA harus sesuai target (nelayan). **Tanggapan Pak Sipri**: upaya dinas jika data tersebut diragukan, maka akan dikonfirmasi oleh DKP Kota/kab. Jadi nelayan tidak hanya dilaut tetapi ada juga nelayan PUD (umum dan daratan).

Perkembangan pendataan rumpon di Teluk Kupang (Pak Dedy)

- Sudah terdata 10 responden untuk rumpon ini
- Banyak rumpon tertanam di teluk kupang (10 responden)
- Butuh masukan dan saran untuk perkembangan penataan rumpon ini

Pemaparan hasil penelitian rumpon milik Muhammad Catur Widyatmoko (disampaikan oleh Wildan)

- Data spot trace yang dikumpulkan dari agustus 2016-januari 2018
- Kapal yang terpasang 34 kapal yang berbeda
- Pada wilayah selatan padat dan wilayah utara juga begitu untuk pergerakan ST
- Dugaan jumlah rumpon pada 3 area yaitu Lombok, Kupang dan Bone yaitu ada 136 rumpon
- Pada area Laut Sawu banyak terdapat rumpon (NTT)
- Asumsi ada 48 rumpon dengan 2 kali kunjungan dimana untuk Kupang ada 14 rumpon (data sampling)
- Menurut Moko fokus pada 1 rumpon dan memancing berhari-hari pada rumpon tersebut berpotensi mendapatkan tangkapan lebih tinggi

a. Diskusi :

- **Pak Sriawan** : bagaimana penentuan titik-titiknya tersebut? Apakah rumpon tidak bisa dideteksi dengan pengindraan jauh (satelit)? **Pak deki** : data yang didapatkan menggunakan metode sederhana yaitu dengan interview. Jika bisa berkolaborasi dengan petugas BKSDA lebih baik lagi. **Pak wildan** : saat ini untuk satelit hanya bisa memantau suhu laut dan clorofil jadi belum bisa digunakan lebih lanjut. Untuk mengetahui potensi ini perlu adanya data awal. Jika dirumpon memiliki reflector maka lebih memudahkan satelit untuk mendeteksi rumpon.
- **Ibu Susi** : bagaimana untuk batasan rumpon? **Pak deki** : sebenarnya laut milik warga Indonesia. Makanya perlu dibuatkan kesepakatan jarak antara 1 rumpon dengan yang lain
- **Pak Yesaya** : Apakah nelayan tersebut nelayan andon atau nelayan NTT? Kalau nelayan andon, bisa saja ada transaksi dilaut. Mungkin solusinya adalah perlu dilakukan patroli dengan polair, PSDKP dan TNI AL untuk pengawasan rumpon ini. **Wildan** : rata-rata nelayan andon.

Penyusunan Rencana Aksi

Spesific : S

Measurable : M

Accepted : A

Realsitic : R

Time Frame : T

RENCANA AKSI KPDP PROVINSI NTT DESEMBER 2018 – JUNI 2019

No	Kegiatan	Indikator keberhasilan	PIC	Dana	Waktu
1	Mendukung pengumpulan data hasil tangkapan nelayan Tuna dan Cakalang di PPI Oeba dan PPP Tenau (Sekunder) Kupang, untuk mendukung kebutuhan data HS dan Provinsi NTT	Tersedianya Data Sampling TCT dalam Data Base Ifish. Dilakukan Rolling Data sampling di PPP Tenau Kupang.	MDPI PPP Tenau, DKP Prov. NTT, PSDKP Kupang, CV. Geovani, PT. Nelayan Hidup Makmur (NHM)	MDPI, DKP Prov. NTT, KKP	Jan-Mei 2019
2	Pelaporan KPDP per – tiga bulanan ke Komite/DKP Provinsi NTT.	Diterimanya Laporan oleh DKP Prov. NTT dengan Anggota KPDP-TCT per tiga Bulan	MDPI		Feb 2019
3	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi anggota KPDP yang memiliki data hasil tangkapan TCT - Pengumpulan data hasil tangkapan TCT oleh anggota KPDP - Technical Data Workshop (Packard 0031) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya Technical Data Workshop di POLTEK KP Kupang dan SUPM Kupang 	MDPI, PPI Oeba, PPP Tenau, PSDKP Kupang, UNKRIS UNMUH Primo Indo, CEP, SKIPM, WWF, BKKPN Kupang, AP2HI	DKP Prov. NTT, MDPI, WWF id, POLTEK KP Kupang (Ruang Rapat)	Februari 2019
4	Support pengumpulan dokumen pengajuan perijinan kapal (Kumpulkan KTP dan Pas Kecil)		DKP Provinsi NTT, MDPI		Jan – Desember 2019
5	Penguatan kerjasama di bidang pengawasan Perikanan		DKP Provinsi NTT, PSDKP, MDPI, POLTEK KP Kupang.		Januari – Mei 2019
6	Penguatan keterlibatan Mahasiswa/siswa dalam pengumpulan data TCT		POLTEK KP Kupang, SUPM Kupang		Jan – Desember 2019

